Ken Ndaru

INDONESIA:

BANGKITNYA KANAN DAN TERSUNGKURNYA KIRI

Indonesia: Bangkitnya Kanan dan Tersungkurnya Kiri[1]

Ken Ndaru[2]

TLDR

Untuk edisi Bahasa Indonesia ini, aku tambahkan kotak TLDR (Too Long, Don't Read) bagi mereka yang kesulitan membaca uraianku.

Kekuatan Kanan yang bangkit jaya pasca kejatuhan Suharto adalah hasil dari **aliansi antara kelompok-kelompok paling reaksioner**: para jenderal dan pemimpin agama yang menganut Teologi Kekerasan. Belakangan, aliansi reaksioner ini didukung pula oleh Kiri Keblinger; yang memilih untuk mendukung fasisme dalam keputusasaan mereka dalam melawan kapitalisme.

Kanan berhasil **menggabungkan politik parlementer** (untuk membuat norma dan moralitas mereka yang diskriminatif menjadi hukum perundang-undangan) **dan kekerasan telanjang** (untuk menyebar ketakutan). Mereka masih pula **memanfaatkan lembaga-lembaga amal publik** untuk mendongkrak popularitas politik mereka.

Sementara Kiri masih **terjebak dalam pola relasi patron-klien** (yang menghambat regenerasi dan berkembangnya diskursus); **pengabaian terhadap dialektika** (yang menyebabkan Kiri terbelah menjadi dua kutub ekstrim: kalau tidak puritan, ya penggadai iman) yang juga menghambat modernisasi atas teori dan alat perlawanan, juga membuat perdebatan tersendat dan menyengat; serta **perceraian antara perjuangan sosial-ekonomis dan perjuangan demokratik**, yang merupakan kunci bagi kerdilnya gerakan Kiri justru di masa di mana kebebasan berpropaganda sudah berhasil direbut.

Perjuangan demokratik bukan saja diceraikan dari perjuangan sosial-ekonomi tapi juga diabaikan. Dan pengabaian inilah yang menjadi gara-gara penyebab Kiri **tidak juga berhasil membangun partai politik yang signifikan**—kecuali beberapa Komite Aksi Besar yang dilabeli sebagai Partai. Tidak bisa insureksi, tidak bisa ikut pemilu, putus asa lalu golput. Kiri mengisolasi diri dan membiarkan Kanan merajalela menggerogoti demokrasi.

Agar dapat keluar dari kubangan ini, Kiri haruslah belajar **menggabungkan perjuangan electoral dengan mobilisasi massa**, mendorong **munculnya para pemimpin dari kalangan rakyat pekerja** dengan melatih rakyat pekerja untuk mengambil inisiatif dalam isu-isu demokratik, **membangun solidaritas kelas** dengan membiasakan rakyat pekerja mengusung isu-isu lintas sektoral, **membangun keyakinan rakyat pekerja** dengan membangun konsensus akan masyarakat sosialis yang dapat didambakan bersama.

[1] Artikel asli ditulis dalam bahasa Inggris untuk New Socialist Insitiative of India.

[2] Mantan Tahanan Politik. Mantan anggota Komite Pimpinan Pusat PRD. Pendiri dan mantan anggota Komite Pusat PRP.

Prolog

Ketika Suharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, kejadian itu terasa seperti kemenangan bagi mereka yang di Kiri. Kita telah ditindas keras, dan kita bertahan. Sekalipun Suharto melancarkan perburuan besar-besaran terhadap PRD setelah Kerusuhan 27 Juli 1996, yang menyasar semua orang yang dicurigai berbau kiri, kita yang di Kiri berhasil bertahan. Dengan menanggung sengsara besar, kita menyerang balik; kita susun demonstrasi-demonstrasi besar yang akhirnya menjungkalkan Suharto setelah tiga dekade bercokol sebagai Presiden. Rasanya luar biasa, melihat orang-orang bersujud dan saling berpelukan—bahkan melompat masuk kolam dan air mancur segera setelah Suharto muncul di televise nasional di hari bersejarah itu. Sepantasnya, ini adalah kemenangan bagi Gerakan Kiri.

Tapi, berbarengan dengan kemenangan datang pula perubahan. Dan, terbukti bahwa menjalankan sendiri apa yang dikotbahkan bukanlah satu hal yang mudah. Kita telah terlampau lama memperjuangkan perubahan, sulit bagi kita untuk menelan pil pahit kita sendiri. Ketika masa memaksa kita berubah, Gerakan Kiri terjungkal.

Debat Awal

Begitu Suharto turun, datanglah Pemilu 1999. Suasananya seperti orang mabuk. Untuk pertama kalinya, setelah satu generasi penuh, orang tidak lagi diharuskan memilih GOLKAR. Partai politik baru bermunculan laksana jamur di musim hujan. Keanggotaan partai-partai baru ini membengkak sampai ribuan, bahkan ratusan ribu, hanya dalam hitungan bulan. Bahkan orang-orang lama PRD juga terkejut ketika orang berbondong-bondong datang ke sekretariat partai, yang saat itu sudah legal, untuk mendaftar menjadi anggota.

Pastinya, kondisi ini memicu debat sengit di kalangan Kiri: apakah kita harus ikut serta dalam pemilu; atau sebaiknya kita tetap di jalanan dan mendorong radikalisme ke arah revolusi sejati? Mereka yang condong pada taktik yang disebut belakangan kebanyakan adalah mahasiswa. Mereka ini masih terus melancarkan demonstrasi-demonstrasi besar, yang seringkali berujung bentrokan dengan polisi. Bag mereka, radikalisme masih membara. Di pihak lain, para pendukung taktik electoral menunjukkan bahwa *tinggal* mahasiswa yang masih di jalanan. Secara umum rakyat masih terus mendukung radikalisme mahasiswa, tapi rakyat kebanyakan telah meninggalkan jalanan untuk terlibat dalam pemilu. Tidak ada buruh, tidak ada petani, bahkan juga nyaris tidak ada lagi kaum miskin kota dalam demonstrasi-demonstrasi pasca jatuhnya Suharto.

Kita dapat meraba bahwa debat ini mirip dengan debat di Rusia pasca gagalnya Revolusi 1905. Tapi kita tdak memahaminya dengan baik. Saat itu kita tidak memiliki akses pada teori. Beberapa rujukan yang tersedia jumlahnya terlalu sedikit dan tidak banyak diketahui keberadaannya; serta biasanya dimonopoli oleh segelintir elit dalam organisasi. Terlebih lagi, kita tidak menguasai konteks kesejarahan Rusia. Sebagian besar artikel pun dalam bahasa Inggris, sebuah hambatan besar bagi aktivis Kiri—dulu dan sekarang. Jadi, sebagian terbesar dari perjuangan Kiri dilandaskan pada pengalaman empiric dan "akal sehat". Begitu tiba waktunya untuk membuat keputusan taktis yang

tepat, dalam kondisi yang berubah cepat, dalam waktu hanya beberapa bulan, Gerakan Kiri yang miskin teori ini kelabakan.

Kedua pihak yang berdebat saling mengutip Lenin, seakan hantu sang Revolusioner besar akan dapat memberi status "*Pravda*" pada argumen masing-masing.

Kita tidak tahu bahwa yang membedakan kedua kasus, yang terpisah nyaris seabad, adalah bahwa Revolusi 1905 adalah revolusinya buruh sejak pangkalnya. Buruhlah yang pertama mengokang senapan, buruh pula yang berbaris di jalanan dan mengawal barikade. Reformasi 1998 merupakan tiruan KW dari apa yang terjadi di Rusia. Kekuatan utamanya adalah kelompok aksi mahasiswa. Sekalipun radikal, mereka gagal meyakinkan buruh untuk melancarkan serangan paling mematikan dalam revolusi manapun: pemogokan umum. Sejujurnya, nyaris tidak ada upaya mahasiswa untuk menyeret buruh agar terlibat selama dan setelah Gerakan Besar 1998.

Di pihak lain, baik Bolsheviks maupun Mensheviks memiliki jejaring propaganda dan mobilisasi yang luar di kalangan buruh—inilah kekuatan utama mereka. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam pemilu, pasca 1908, dan mengirimkan wakil mereka ke dalam Duma (parlemen kekaisaran) ketika gelombang revolusioner telah mereda. Gerakan Kiri Indonesia tidak memilikinya. Kiri hanya memilki jejaring mobilisasi besar, terutama di kalangan mahasiswa, tapi tidak untuk propaganda. Jadi, sangatlah sulit, nyaris mustahil, bagi Gerakan Kiri untuk menyusun mesin electoral yang efektf dalam waktu sependek itu.

Demikianlah, kedua sisi perdebatan ini sebenarnya sama timpangnya. Tanpa dukungan buruh dan tani, kegagalan gerakan mahasiswa sudah dapat dipastikan. Di pihak lain, memenangi pemilu juga jauh dari jangkauan. Yang sesungguhnya kita butuhkan adalah satu solusi kreatif untuk menjangkau buruh dan tani, meyakinkan mereka untuk memasuki arena politik. Jika diingat-ingat, barangkali kita sebenarnya bisa menggunakan pemilu sebagai satu platform untuk mengkampanyekan perbesaran partisipasi buruh-tani dalam industry, atau dalam proses pengambilan keputusan publik. Kita tidak melakukannya. Gerakan Kiri malah mengambil sikap "*elu elu, gua gua*": kedua pihak pada akhirnya saling mengabaikan dan terus menggenjot taktiknya masing-masing menuju akhir yang penuh bencana.

Tidak satupun pihak yang lebih merugi daripada kebimbangan ini ketimbang PRD.

PRD berperan besar dalam masa-masa menjelang Gerakan Besar 1998. Di antara organisasi Kiri tahun 1990-an, PRD-lah yang membayar paling mahal untuk penentangan terhadap Suharto: para pemimpinnya dipenjara, ratusan kader ditangkap dan disiksa, beberapa di antaranya dihilangkan paksa. Namun PRD berhasil bangkit dan mendorong terbentuknya koalisi Mega-Bintang-Rakyat untuk meradikalisasi rakyat melawan Suharto.[1] Koalisi inilah yang memicu kerusuhan di berbagai tempat, terutama di pantai utara Jawa, sepanjang tahun 1997; pendahulu bagi demonstrasi-demonstrasi yang lebih massif dan terorganisir di tahun 1998.

Namun kebimbangan dalam perkara pemilu membuat PRD terdampar pasca jatuhnya Suharto. Pada hari di mana Partai memaklumkan diri secara resmi sebagai sebuah partai legal, ia membentangkan

spanduk berisi slogan “Coblos PRD atau Boikot Pemilu”. Slogan bunuh diri ini praktis membelah partai menjadi dua faksi yang saling menyabot satu sama lain.

Sayangnya, kedua faksi tidak cukup mengasah efektivitas dari taktik masing-masing. Mereka yang tetap di jalanan makin mengasingkan buruh dan tani karena melancarkan demonstrasi besar-besaran jauh di tengah pusat kekuasaan di perkotaan; jauh dari sarangnya serikat-serikat buruh dan tani. Nyaris tidak ada buruh atau tani dalam demonstrasi-demonstrasi di awal Reformasi. Mereka yang bertarung dalam pemilu, di pihak lain, akhirnya menggunakan HAM sebagai basis platform politik mereka. Di bawah sepatu bot Orde Baru, HAM adalah tuntutan yang progresif karena pelanggaran HAM begtu sering terjadi, sehingga menjadi norma. Namun PRD gagal menyajikan satu platform yang secara tegas lebih maju daripada program liberal yang marak bertebaran dalam pemilu 1999.

Terlebih penting, PRD gagal menyajikan alternatif terhadap bangkitnya kekuatan “Islam politik”. Islam, sebagai ideologi, dinyatakan terlarang di era Orde Baru karena dipandang sebagai “politik aliran” dan satu ancaman terhadap kesatuan bangsa. Kelompok-kelompok Islam, yang berperan besar dalam menghancurkan komunis selama pembantaian 1965-1968, dipinggirkan dan dipaksa bersatu ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Semua ekspresi radikal dari Islam politik akan dicap Ekstrim Kanan; bayangan cermin dari “ekstrim kiri” yang dicapkan pada komunis. Pasca Suharto tidak lagi berkuasa, sayap radikal dari Islam politik membangun beberapa partai politik; yang paling menonjol adalah Partai Keadilan—pendahulu dari Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang. Partai-partai ini, khususnya PK, tegas-tegas menginginkan agar moralitas konservatif mereka dijadikan hukum publik. Mereka berani muncul dengan identitas baru mereka sebaga partai konservatif, bahkan ketika Suharto baru saja turun. PRD gagal menyediakan alternatif tegas baik terhadap kekuatan liberal maupun konservatif. PRD gagal menyajikan sosialisme sebagai solusi bagi problem yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.

Pemilu 1999 adalah sebuah bencana bagi PRD. Boikot tidak terjadi. *Voter turnout* untuk pemilu ini mencapai 93.3%.[2] Demonstrasi besar mahasiswa yang dilancarkan pasca kejatuhan Suharto gagal meyakinkan rakyat tentang tidak absahnya pemilu ini. Di pihak lain, hanya 78.730 orang yang mencoblos PRD. Kita dapat berkilah bahwa banyak suara PRD yang “hilang” dalam perjalanan dari TPS ke tempat penghitungan; tapi faktanya tidak berubah: PRD gagal total dalam pemilu ini.

Tapi bencana ini tidak harus berujung pada kerusakan permanen. Jumlah suara yang masuk bagi PRD, sekalipun kelihatannya kecil, masihlah tetap merupakan perluasan yang hebat atas dukungan bagi partai; yang bahkan pada puncak kejayaannya hanya beranggotakan sedikit lebih dari 2000 orang. Jika saja kepemimpinan partai melihat hal ini sebagai satu kesempatan, kekuatan PRD akan tumbuh berlipat ganda pasca pemilu. Tapi, tidak, partai memutuskan bahwa terlalu banyak anggota baru yang “belum teruji”. Anak-anak ingusan ini dipandang sebagai ancaman terhadap “kemurnian” ideology partai—yang lantas menyusul adalah pembersihan. Banyak Komite Kota yang bermunculan untuk menjawab seruan agar mendirikan sekretariat partai di mana saja, lantas “diperiksa seksama”—dan, ketika dinyatakan “kurang”, dibubarkan. Bukannya tumbuh menjadi satu Partai Kiri yang benar-benar masif, PRD malah mengebiri diri sendiri.

Lewat kegagalannya menyelesaikan persoalan Pemilu, Gerakan Kiri Indonesia mengutungi kakinya sendiri. Ini adalah kesalahan yang tidak perlu terjadi, bukan karena tekanan pihak luar; dan dampak dari kesalahan ini bergulir makin hari makin besar seperti bola salju. Gerakan Kiri Indonesia tidak pernah bangkit dari kegagalan ini. Pasca 1999, Gerakan Kiri Indonesia ketinggalan kereta.

Berpartai atau Tidak?

Setelah PRD dengan sukarela mengebiri diri sendiri pasca Pemilu 1999, Indonesia tidak lagi memiliki Partai Kiri yang benar-benar memiliki kapasitas untuk membuat kapitalisme gemetar. Pemilu meninggalkan luka bernanah dalam kejiwaan Gerakan Kiri Indonesia, dan "politis" kini berarti menancap kaki dalam-dalam pada akar rumput. Tidak akan ada lagi kampanye politik yang menggelegar. Gerakan Kiri kini pergi mengabdi ke pabrik-pabrik dan desa-desa, "Organisir!" menjadi slogan barunya. Serikat-serikat buruh dan tani merah bermunculan begitu para mahasiswa yang berpengalaman politik bekerja erat bersama aktivis buruh dan tani. Internasionale (walau dalam titinada yang agak berbeda dari versi yang diakui secara global) dinyanyikan secara terbuka di tengah pemogokan dan demonstrasi buruh. Ide tentang sosialisme kini didiskusikan terbuka di tengah buruh dan tani. Tapi, ini tapinya, buruh dan tani tidak lagi boleh "ditunggangi" oleh "isu politik". Sebaliknya, "isu politik" haruslah melayani kepentingan "nyata dan mendesak" dari kaum buruh. Dan dengan itu, partisipasi Gerakan Kiri dalam politik lantas dibatasi hanya pada isu-isu yang terkait langsung dengan kepentingan serikat.

Jadi, dari satu titik ekstrim—radikalisme yang terisolasi dari buruh dan tani, Gerakan Kiri Indonesia berayun ke titik ekstrim yang lain—radikalisme buruh dan tani yang terisolasi dari dunia politik yang lebih luas. Tentang berbagai isu yang menarik partisipasi politik dari berbagai sektor masyarakat, Gerakan Kiri nyaris tidak bersuara. Isu pornografi, korupsi, penindasan agama, kekerasan terhadap perempuan; isu-isu ini dianggap tidak punya dampak nyata terhadap masalah "nyata" gerakan buruh: upah murah, kondisi kerja yang buruk dan, yang terpenting, informalisasi ketenagakerjaan. Dengan demikian, Gerakan Kiri Indonesia berpuas diri dengan menyerahkan isu-isu ini ke tangan Liberal dan Konservatif.

Sungguh mencerahkan ketika kita melihat bahwa sebagian besar dari isu-isu publik ini terkait dengan Islam Politik. Pendekatan konservatif atas pornografi memenangkan pertempuran di legislative; dan moralitas konservatif pun menjadi hukum nasional. Pada tingkat lokal, keadaannya lebih buruk lagi. Satu persatu, DPRD mengesahkan PERDA Syariah; semua orang pura-pura tidak melihat ketika perda-perda syariah ini bertabrakan dengan hukum nasional. Hanya segelintir yang peduli ketika peraturan-peraturan ini menaruh pembatasan keras pada perempuan; seperti kriminalisasi atas perempuan yang masih ada di jalanan setelah jam 9 malam, [3] atau larangan bagi perempuan untuk duduk mengangkang di atas sepeda motor.[4] Semua ini terjadi dengan restu Kementrian Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa pembatasan ini adalah demi melindungi perempuan.[5]

Tapi yang terburuk adalah bahwa serangan terhadap umat beragama minoritas meningkat pesat, dan para pelakunya digadang-gadang sebagai "pembela agama". Konflik agama berdarah pecah di

Ambon sedini 1999 dan di Poso tidak berapa lama sesudahnya. Konflik bersenjata di Ambon adalah sangkakala bagi apa yang menjelang: aliansi antara dua unsur paling reaksioner dalam tatanan masyarakat Indonesia—tentara Orde Baru dan kelompok Islam pengguna kekerasan. Sudah diketahui kini bahwa setidaknya satu faksi dari militer Indonesia memberikan dukungan pada para jihadis; atau, setidaknya, bersimpati terhadap mereka.[6]

Kebungkaman Gerakan Kiri terorganisir sekalipun tanda-tanda ini jelas menampakkan bangkitnya Sayap kanan, dulu dan sekarang, sangatlah mencekam.

Bukan saja dalam hal kebangkitan sayap Kanan, Gerakan Kiri bungkam. Mari kita lihat isu lain, isu yang disebut "cicak vs buaya" ; di mana partisipas publik begitu besar sehingga mau tidak mau Gerakan Kiri terpaksa ikut. Dengan sangat terlambat, Gerakan Kiri berusaha merebut kepemimpinan isu tersebut dari tangan kaum Liberal—dan gagal total. Sungguh mengherankan sebetulnya, karena para pemimpin isu ini sebenarnya bukanlah aktivis. Mereka hanya orang-orang yang peduli. Orang-orang Kiri tidaklah terlalu diterima, khususnya karena Gerakan Kiri tidaklah melakukan apapun yang dapat membangkitkan rasa hormat dari massa—Gerakan Kiri bahkan tidak menyerukan mobilisasi buruh dan tani besar-besaran untuk mendukung isu anti-Korupsi.

Namun demikian, banyak orang Kiri yang secara individu masih terlibat dalam isu-isu publik ini, terutama mereka yang menggunakan NGO sebagai kendaraan. Aku tidak akan menyebut tindakan perorangan ini sebagai bagian dari tindakan Gerakan Kiri karena orang-perorangan ini membatasi diri mereka pada HAM, tidak mempromosikan sosialisme sebagai ideologi alternatif dan, yang terpenting, tidak mengusung tujuan terpenting Gerakan Kiri: emansipasi dari massa rakyat pekerja.[7]

Fokus pada "perjuangan massa" ini bukannya tidak berarti apa-apa. Di tahun 2006, lima puluh ribu buruh berparade di jalanan Jakarta untuk memperingati May Day—jumlah terbesar sejak Orde Baru bangkit di tahun 1965. Ini hanyalah sangkakala bagi apa yang datang berikutnya: Pemogokan Umum pertama sejak berkuasanya Orde Baru, di tahun 2013, yang diikuti oleh tiga juta buruh.[8] Dan, di salah satu pusat kekuatan Pemogokan Umum ini, di Kabupaten Bekasi, momentum ini dilanjutkan dengan pencalonan Obon Tabroni dalam pilkada 2017.[9] Obon adalah salah satu pemimpin buruh di Bekasi, yang memainkan peran besar dalam suksesnya Pemogokan Umum 2013.

Namun demikian, persis pencalonan ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kekuatan buruh tidaklah otomatis membawa buruh lebih dekat pada emansipasi. Pemeriksaan sepintas atas Sembilan Program Prioritas Obon[10] akan memperlihatkan bahwa program ini begitu dekat dengan apa yang disebut "ekonomi pasar terkoordinasi".[11] Program ini menunjukkan dorongan besar untuk memperbaiki taraf hidup buruh *di bawah kapitalisme*.

Kita sungguh harus memuji pencalonan Obon. Dari 700 ribu buruh di Bekasi (di mana mungkin hanya 10%-nya memiliki KTP setempat dan dapat mencoblos dalam pilkada), sekitar 40 ribu memilihnya.[12] Sekalipun kalah dalam pilkada, Obon menunjukkan bahwa buruh sudah siap bagi pertarungan politik yang sesungguhnya. Masalahnya adalah *hakikat* dari pertarungan ini: apakah kita berjuang untuk hidup lebih baik *di bawah kapitalisme*, atau untuk emansipasi *di bawah sosialisme*?

Dan di sinilah kurangnya kepemimpinan politik dan ideology dari Gerakan Kiri memukul kita dengan keras.

Persis di persimpangan sejarah inilah kehadiran sebuah Partai Kiri akan menjadi vital untuk mendorong buruh ke arah kesadaran sejatinya. Sekalipun tidak ada pengaruh luar, buruh akan tetap mampu menemukan kesadaran sejati mereka sendiri. Pada akhirnya. Tapi kita tahu bahwa tatanan dunia kapitalis tidak akan pernah membiarkan buruh menemukan kesadaran itu—penyerangan terhadap pemogokan, pembubaran serikat akan selalu membayangi perjuangan buruh di setiap langkah sejarahnya. Penindasan, hegemoni dan sogokan adalah tiga kepala dari Anjing Neraka yang menjaga agar buruh tetap terkekang dalam Neraka Kapitalis. Dan, sebagaimana biasa, ideology sektarian dan patronisme akan selalu bersaing untuk meracuni pikiran buruh, menyesatkan mereka. Di sinilah partai politik Kiri menjadi vital, untuk menangkal langkah-langkah jahat kapitalisme; demi membawa buruh lebih cepat ke arah emansipasi.

Tunggu! Bukankah terlalu dini untuk melompat ke kesimpulan bahwa kita benar-benar butuh sebuah partai untuk mengamankan perjuangan kelas pekerja—yang senantiasa berada di bawah gempuran mesin politik dan ideology kapitalis? Mungkin gerakan kontra-hegemoni kultural sebenarnya memadai? Sesungguhnya, ini adalah salah satu masalah besar yang belum terpecahkan oleh Gerakan Kiri Indonesia; sebuah perpanjangan dari perdebatan di era 1990-an tentang apakah kita perlu gerakan politik atau gerakan kultural.

Pihak yang berpendapat bahwa kita membutuhkan gerakan politik memenangkan argument dengan mendorong Suharto keluar dari Istana Tapi argumen tentang gerakan kultural muncul kembali pasca 1998, khususnya setelah banyak politisi (baca: anggota partai-partai borjuis) dihukum karena korupsi. Argumen "Kekuasaan itu cenderung korup, dan partai politik berebut kekuasaan" diteruskan lewat logika Aristotelian menjadi "Partai politik itu korup". Sentimen anti partai ini dikocok terus, terutama dalam bentuk gerakan Golput.

Debat ini sangatlah disayangkan; karena untuk berhasil melawan kapitalisme, kita butuh perjuangan dalam bidanng politik, budaya, ideologi, ekonomi dan sosial. Gerakan budaya adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan sebuah partai. Sebuah partai perlawanan diharuskan mengubah cara orang berpikir, bereaksi dan berperilaku; dengan kata lain, ia harus menjadi sebuah gerakan budaya.

Tapi demikianlah adanya. Debat sia-sia ini adalah akibat dari fakta bahwa sentiment anti partai bukan hanya kuat di kalangan Kiri secara umum; tapi juga di tengah mereka yang terlatih menggunakan Marxisme. Kecenderungan membatasi Marxisme hanya sebagai "pisau analisa" telah berkembang sejak 1980-an, ketika bacaan Marxis pertama kali masuk tetes demi tetes ke Indonesia. Dan kecenderungan ini masih tetap kuat sampai hari ini.

Kelas pekerja tengah bangkit, dan mereka kini tersesat karena tidak ada yang mau maju ke depan untuk memimpin mereka menuju kesadaran sejatinya. Dan debat apakah kita membutuhkan satu Partai Kiri hanyalah awal dari sederet panjang kesulitan yang mengepung Gerakan Kiri Indonesia pada simpang sejarah ini.

Rumah dari Gedeg, Berpondasi Pasir, Dibangun Asal-asalan

Mengejutkan, dan juga sedikit menggidikkan, bahwa dua dasawarsa setelah Suharto dan Orde Barunya tumbang, masih belum juga ada sebuah Partai Kiri yang *sungguhan* di Indonesia. Tentu, ada banyak kelompok yang mengklaim berjudul "partai"—PRD masih juga bercokol, menolak mati dan memilih jalan panjang menuju kesuraman; ada Persatuan Perjuangan Indonesia; ada Partai Rakyat Pekerja; ada KPO-PRP, faksi pecahan dari PRP; dan ada juga Partai Hijau, yang mengklaim secara eksplisit bahwa mereka tidak di kanan maupun di kiri.[13] Tapi mari kita jujur saja, semua ini hanya "partai" dalam judul.

Di luar kecilnya jumlah orang yang *benar-benar* menjadi anggota partai-partai ini, kelompok-kelompok tersebut belum pernah membuat pernyataan tegas mengenai sejumlah persoalan fundamental yang akan membedakan mereka dari serikat (atau bentuk-bentuk gerakan rakyat lainnya). Singkatnya, kelompok-kelompok ini tidak pernah menjawab pertanyaan: apa itu partai, dan apakah kita membutuhkannya?

Orang tidak bisa begitu saja membuat rumah tanpa terlebih dahulu mendesain rumah itu sampai ke detil terkecil. Makin besar rumahnya, makin rumit desainnya. Bisa saja orang membangun rumah tanpa rencana tapi ujungnya pasti penyesalan ketika rumahnya ambruk. Atau orang bisa saja mencontek cetak biru orang lain, tapi bisa jadi ujungnya menyesal karena rumah itu tidak cocok dengan keperluan. Hidup dengan penyesalan di rumah yang tidak membahagiakan itu sengsara adanya.

Namun sejujurnya, Gerakan Kiri Indonesia tidak punya pilihan untuk mengikuti satu pola baku. Nyaris semua literature Kiri dari sejarah Indonesia telah dihancurkan dalam pogrom yang dilancarkan oleh Orde Baru. Sebagian besar kader terlatih dan para pemimpin masa itu juga telah dibunuh. Sampai jatuhnya Suharto, literature Kiri sangat sedikit dan jarang dapat ditemui. Kita terpaksa membangun satu struktur untuk memfasilitasi perlawanan terhadap Suharto dan kedigdayaan militernya. Demikianlah kita sampai pada satu struktur yang ramping, cekatan dan lentur; di mana segelintir kader dapat memaksimalkan dampak dari tiap maneuver yang dibuat. Saat itu adalah saatnya Perang Manuver, gerilya politik, melawan mesin propaganda dan penindasan Orde Baru yang jauh lebih perkasa. Kesuksesan struktur ini tidak dapat dibantah.

Ketika tiba waktunya untuk menaikkan tingkat keorganisasian, sayangnya kita tidak sadar bahwa struktur yang ramping ini tidak mudah untuk diperbesar. Jika kita ambil analogi, struktur sel pasti beda dengan struktur otot; struktur sebuah organ tubuh berbeda dari keduanya. Tiap jenis struktur melayani kegunaan yang berbeda. Jadi, struktur yang sukses melawan represi Suharto, di mana jumlah kader hanya secuil dan kerja-kerja harus dilakukan secara rahasia, mungkin tidak akan jalan di bawah kondisi yang relative bebas untuk melakukan rekrutmen massal dan kerja politik terbuka.

Kemenangan atas Suharto memaksa Gerakan Kiri untuk memasuki demokrasi liberal. Dan, selama lebih dari dua dasawarsa sesudahnya, Gerakan Kiri terus mempertahankan wawasan dan struktur yang dulu diperlukan untuk bekerja di bawah represi berat yang mematikan. Kita telah terlena. Kita membuang dialektika, yang menitahkan bahwa segala hal berubah, dan memilih untuk memeluk

erat-erat segala sesuatu yang dulu telah membawakan kemenangan bagi kita dalam situasi teramat sulit.

Tidak akan terlalu keliru jika kita sebut Partai-partai Kiri Indonesia yang sekarang sebagai Komite Aksi yang diperluas. Sebagian besar di antaranya (kalau bukannya semua) tidak memiliki mekanisme akuntabilitas public, audit internal atau saluran keluhan. Mereka biasanya tidak memiliki rencana keberlanjutan; termasuk regenerasi kepemimpinan, menghasilkan pendapatan, sistem iuran yang ajeg, bahkan sistem evaluasi dan pengawasan. Pendeknya, kita tidak memiliki apa yang seharusnya dimiliki organisasi modern untuk dapat bersaing memperebutkan dominasi dalam era digital sekarang ini.

Benar, banyak Partai Kiri besar di masa lalu juga tidak memiliki semua mekanisme yang disebut di atas—setidaknya tidak dalam bentuk yang kita kenal. Namun demikian, semua partai kiri yang jaya di masa lalu merupakan puncak dari kecanggihan pengaturan organisasional di masanya masing-masing; dengan segala keterbatasannya masing-masing. Di mana pun Partai Kiri berhasil merebut kekuasaan, kita bisa lihat bahwa tingkat kapasitas organisasionalnya sanggup mengatur ratusan ribu bahkan jutaan anggota.

Perdebatan tentang partai adalah debat yang, sayangnya, tidak pernah terjadi. Gerakan Kiri Indonesia berpuas diri dengan berdebat lewat tema yang tidak relevan: "partai revolusioner vs partai pemilu"—satu debat yang sangat tidak pada tempatnya karena partai revolusioner haruslah diperbandingkan dengan partai reformis. Lebih jauh lagi, baik insureksi maupun pemilu adalah dua senjata yang harus hadir dalam perbendaharaan partai revolusioner; untuk digunakan dalam berbagai kondisi yang berbeda.

Debat ini juga sangat merugikan; karena sementara debat ini berkobar di Gerakan Kiri, Sayap Kanan bersiap untuk meluncurkan semua torpedo mereka ke arah demokrasi dan semua yang telah dicapai lewat Reformasi. Dengan mendayagunakan ruang demokratik yang dihasilkan oleh Reformasi, Sayap Kanan mendirikan partai-partai yang mencapai kesuksesan dalam pemilu. Dan, dengan mengirim anggota-anggota mereka ke parlemen, Sayap Kanan berhasil menjadikan moralitas konservatif mereka menjadi hukum positif. Dengan menunggangi nama Islam, Sayap Kanan kini melancarkan perang terbuka melawan demokrasi, hak asasi perempuan dan HAM secara umum—semua yang dipropagandakan sebagai "produk Barat". DI pihak lain, mereka memiliki tukang pukul yang diorganisir ke dalam kelompok paramiliter seperti FPI; yang telah sukses mengorganisir kekerasan dan mobilisasi massa besar-besaran lewat kampanye kebencian telanjang.

FPI, secara khusus, harus diberi sorotan. Sejarahnya yang penuh dilabur kekerasan diawali bulan November 1998 ketika unsur-unsur FPI bergabung di bawah bendera PAM Swakarsa—satu kelompok paramiliter yang dibentuk oleh Jen. Wiranto untuk berhadapan dengan demonstrasi mahasiswa pasca tumbangnya Suharto. Di samping Wiranto, beberapa jenderal militer dan polisi juga telah dihubungkan dengan FPI; seperti Prabowo Subianto, Nugroho Djayoesman dan Djaja Suparman.[14] Wikileaks bahkan menyebut bahwa Kepolisian RI dan BIN secara reguler menggunakan

FPI sebagai "*attack dogs*".[15] Tidak heran bahwa FPI seperti terus-menerus dapat Kartu Bebas Penjara, tidak peduli berapa berdarah aksi kekerasan yang mereka lakukan.

Jadi, Sayap Kanan memainkan kedua jalur yang tersedia. Di satu pihak, mereka menggunakan proses demokratik untuk memasukkan moralitas konservatif—yang bertentangan dengan demokrasi dan nilai-nilai HAM. Di pihak lain, mereka bekerja erat bersama unsur-unsur reaksioner, khususnya di kalangan militer, untuk menciptakan kekacauan dan suasana ketakutan—yang akan mendorong orang untuk semakin mencari "keamanan dan kepastian" di bawah moralitas konservatif. Mereka dapat Bonus Point karena kekacauan ini dapat mereka gunakan untuk semakin membuktikan bahwa "demokrasi telah gagal".

Tentu saja akan terjadi kontradiksi antara cara-cara electoral dan mobilisasi massa. Ini tidak terhindarkan. Tapi Sayap Kanan telah berhasil menggunakan kedua kendaraan ini dengan cara yang saling mendukung—sementara Gerakan Kiri lumpuh tak berdaya.

Dan, seperti mengejek Gerakan Kiri yang tidak berani tampil ideologis secara terbuka, Sayap Kanan mencapai kejayaannya yang sekarang dengan mengandalkan propaganda ideologis—tentang pendirian "surga di bumi" dalam bentuk sebuah teokrasi. Tidak ada tuntutan pemberantasan korupsi, kerja layak atau hak atas tanah, bahkan juga transportasi massal atau lingkungan sehat (kecuali mungkin secara *lip service*). Sayap Kanan memaku propaganda mereka ke kepala rakyat pekerja dengan menggarisbawahi program ideologis mereka.

Tentu saja mereka juga memiliki kerja sosial-ekonomis di tengah massa: mereka menciptakan jejaring amal dan borjuasi kecil yang saleh (tentu saja dengan standar kesalehan yang konservatif). Mereka menciptakan sejumlah besar badan amal untuk mengumpulkan zakat dan sedekah, lalu mendistribusikannya. Mereka bahkan secara praktis mengambil alih badan-badan amal yang bekerja dengan bendera Islam seperti Dompet Dhuafa, dengan mengirim kader untuk bekerja pada badan-badan tersebut.[16] Sayap Kanan juga menyedakan modal untuk memulai bisnis kecil, seringkali dengan suku bunga rendah, yang sangat menarik bagi kelas menengah; sekaligus menciptakan lapangan kerja, sekalipun sangat bersifat informal. Strategi ini bekerja dengan baik di bawah neo-liberalisme, di mana kapitalis memangkas pengeluaran untuk keperluan publik dan mengikis jaminan kepastian kerja.

Pendeknya, Sayap Kanan bersedia melancarkan serangan gabungan untuk menghancurkan demokrasi. Dan Gerakan Kiri, yang keras kepala tidak mau berubah, gagal memberikan balasan secara tangguh, tanggon dan trengginas.

Bagaimana seharusnya Gerakan Kiri menyambut kebangkitan Sayap Kanan?

Gerakan Kiri yang Bingung dan Keblinger

Aku telah membandingkan jalan yang diambil baik oleh Sayap Kanan maupun Gerakan Kiri setelah jatuhnya Suharto; bagaimana Sayap Kanan memilih menggunakan pendekatan serangan gabungan sementara Gerakan Kiri berlompatan dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Dan aku telah

menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil Sayap Kanan adalah pendekatan yang benar, yang buahnya hari ini adalah kebangkitan mereka yang nampaknya tak tertahankan.

Kita perlu melangkah mundur untuk mencari tahu bagaimana Gerakan Kiri akhirnya memilih pendekatan yang keliru sekalipun mengaku menggenggam cara pikir yang ilmiah.

Ingat slogan absurd "Coblos PRD atau Boikot Pemilu"? Aku beri tahu sekarang bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang slogan ini, sekalipun saat itu aku memangku jabatan sebagai Ketua Departemen Organisasi dalam Komite Pimpinan Pusat PRD. Benar. Bahkan sebagai anggota KPP, aku tidak tahu-menahu adanya debat yang menghasilkan slogan ini. Setelah susah-payah mengejar informasi, akhirnya aku tahu bahwa keputusan ini dibuat oleh "orang-orang bawah". Mereka ini adalah kader-kader paling senior, beberapa di antaranya adalah pendiri PRD, beserta para ajudan dan anak emas mereka. Debat mengenai slogan ini nampaknya dilakukan dalam waktu lama secara rahasia. Aku berusaha mendapatkan dokumentasi mengenai debat ini, agar dapat memahami jalan pikiran yang menghasilkan kerancuan ini; namun jawaban yang kudapat adalah bahwa dokumentasinya memang tidak ada—sekalipun ada, aku tidak cukup dipercaya untuk dapat melihatnya.

Kisah kecil ini menyoroti dua kecenderungan yang berperan penting dalam keambrukan Gerakan Kiri di era Reformasi. Dan aku dapat menyatakan dengan pasti bahwa kecenderungan ini hadir nyaris di setiap organisasi Kiri di negeri ini.

Pertama, kecenderungan "kepemilikan" organisasi oleh para pendirinya, dan bahwa para "pemilik" ini enggan melepaskan cengkeraman mereka pada proses pembuatan keputusan. Beberapa dari mereka terang-terangan terus bercokol di tampuk kepemimpinan; beralasan bahwa organisasi membutuhkan kader-kader terbaik, dan merekalah kader terbaik yang dimiliki organisasi. Beberapa yang lain melepaskan jabatan formal, namun lantas membentuk klik yang secara efektif berfungsi sebagai "partai dalam partai". Yang lain meninggalkan posisi mereka dan mengambil posisi "Orang Besar" yang harus dimintai restu sebelum satu keputusan dapat dijalankan; praktisnya, mereka memiliki hak veto atas kepemimpinan resmi organisasi. Sejujurnya, Gerakan Kiri Indonesia telah mengembangkan satu budaya patron-klien.

Budaya patron-klien ini semakin dikukuhkan oleh akses ekonomi yang biasanya dinikmati oleh para pendiri ini; sebagai OrLa (Orang Lawas) mereka biasanya memiliki akses pada organisasi di luar negeri atau elit local yang dapat memberikan bantuan keuangan. Mereka lantas bertindak sebagai distributor atas akses yang terbatas ini, biasanya kepada anak emas mereka. Dalam satu contoh anecdotal, yang konon terjadi di dalam debat terakhir antara "orang-orang bawah" PRD dengan faksi Demokratik Sosialis (yang belakangan dipecat dari PRD di awal 2001), salah satu "pak tua" ini mengingatkan para faksionalis tentang bantuan keuangan/sokongan hidup yang mereka terima ketika kader-kader bawel ini pertama kali datang ke Jakarta (sebagian besar dari mereka datang dari daerah-daerah). Akses pada sumberdaya ekonomi ini merupakan semen pada beton paternalism-klientelisme yang mengunci Gerakan Kiri.

Kedua, Gerakan Kiri tidak punya tradisi debat ideologis yang terbuka dan terstruktur. Debat sangat dibatasi dalam tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatan dalam organisasi, semakin besar akses

orang pada debat ideologis. Hanya anggota dari Komite Sentral (atau Biro Politik, atau badan sejenis) yang diperbolehkan menjawab masalah ideologis. Semua orang harus menunggu "arahan" sebelum diperbolehkan mengambil tindakan politik. Jika tidak ada arahan, tindakan politik harus diambil berdasarkan akal sehat dan "insting".

Sekalipun telah ada IndoProgress, yang berfungsi sebagai platform perdebatan di Internet untuk berbagai aliran Kiri di Indonesia, belum pernah ada pengukuran tentang keefektifan platform ini di tengah massa rakyat pekerja.

Di samping itu, nyaris tidak ada praktek evaluasi historis yang dilakukan Gerakan Kiri—bahkan terhadap pengalamannya yang belum lama lewat; sekalipun debat tentang sejarah adalah salah satu tema debat yang merupakan ciri tradisional Gerakan Kiri secara global. Mengutip satu komentar yang konon dibuat salah satu anggota Biro Politik PRP tentang kebutuhan untuk meninjau kembali sejarah perpecahan yang terjadi pada organisasi: "Itu hanya akan menghasilkan debat yang tidak produktif." Debat terbuka dianggap memecah-belah, melelahkan dan menghambat orang dari kerja-kerja pengorganisiran massa. Inilah cara pikir yang menghasilkan kompartementalisasi perdebatan di Kiri.

(Catatan: Salah satu anggota Biro Politik PRP telah menghubungi aku lewat jalur pribadi, setelah membaca versi Bahasa Inggris dari artikel ini, yang diterbitkan terlebih dahulu, untuk memprotes paragraf di atas. Akses atas dokumentasi periode perpecahan telah dibuka, katanya, hanya saja tidak ada yang berminat untuk mempelajarinya.)

Menimbang sejarah Gerakan Kiri Indonesia kontemporer, budaya ini menghasilkan satu masalah maha besar. Kebanyakan dari para pemimpin Gerakan Kiri tidaklah mengalami pendidikan ideologis yang terstruktur. Kelas ideologis nyaris tidak ada. Sebagian besar orang Kiri hanya pernah menerima pendidikan dalam tahap perkenalan pada ideology. Dan, karena kurangnya perdebatan mengenai sejarahnya sendiri, Gerakan Kiri juga mengabaikan proses menteorikan praktek. Singkatnya, Gerakan Kiri mengabaikan praksis. [17] Terbatasnya peserta debat, terbatasnya kapasitas ideologis dan kurangnya proses pembelajaran dan penyusunan teori dari praktek—inilah ketiga factor yang telah membuat Gerakan Kiri terlena dalam kesesatan.

Gabungkan kedua kecenderungan ini, dan yang kita dapatkan adalah Gerakan Kiri yang nekat berputar-putar dalam lingkaran, terpaku pada masa lalu yang jaya sementara bimbang menghadapi masa kini.

Pertanda pertama bahwa Gerakan Kiri kebingungan muncul sedini tahu 2002-2003 ketika serangkaian perpecahan terjadi di tengah organisasi-organisasi Kiri pada saat hampir bersamaan. Jika dikilas-balik, kita mungkin dapat mencium bahwa ada satu hal yang sistematik terjadi di balik layar. Sungguh mengherankan bahwa dalam waktu pendek, beberapa organisasi Kiri mengalami perpecahan. Kita seharusnya curiga dan mulai menyelidiki gejala ini lebih jauh. Tapi kita tidak melakukannya. Tiap faksi sibuk mencari celah untuk menyerang faksi lawannya, sekaligus bekerja keras memelihara pengikut mereka sendiri.

Satu gambar lain akan muncul jika kita lihat bahwa rangkaian perpecahan ini terjadi berbarengan dengan menguatnya Sayap Kanan. PKS, salah satu partai Sayap Kanan yang paling lebar mulutnya, memperbesar keanggotaan mereka dari 33.000 di tahun 1999 menjadi 400.000 di tahun 2004.[18] Akan nampak satu gambar lain ketika kita menyadari bahwa salah satu seloroh yang paling banyak dilontarkan dalam pertemuan kelompok-kelompok kiri adalah bahwa "jaman Suharto lebih enak", bahwa "lebih mudah mengorganisir saat represif" karena "hanya di saat represi Gerakan Kiri bisa besar". Karena lelucon seringkali berfungsi sebagai saluran rasa frustrasi, seloroh itu menunjukkan bahwa secara naluriah Gerakan Kiri paham mereka harus berubah, harus beradapatasi dengan situasi baru—dan menolak untuk berubah.

Orang-orang ini mengaku menggenggam satu cara pandang atas dunia, di mana satu-satunya hal yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Dan ketika mereka sendiri harus berubah, mereka takut akan perubahan. Ironis. Memalukan.

Keraguan untuk berubah ini, pada hematku, adalah factor terpenting yang mencegah Gerakan Kiri untuk bersuara dalam Pemilu 2004; pemilu di mana partai-partai yang mengumpulkan suara berdasarkan kesamaan agama[19] mendapatkan hampir 40% suara. Jika kamu mengaku Kiri, kamu seharusnya sudah gemetar terkencing-kencing mendapati kenyataan ini.

Dan, tentu saja, Gerakan Kiri mencoba membalas. Sayangnya, salah jalan. Bukannya merengkuh perubahan, Kiri malah memecah diri menjadi mereka yang mengambil jalan pemurnian (yang sering kali dikenal sebagai "reifikasi"), dan mereka yang malah menjadi kolaborator kelas.

Aku harus menggarisbawahi bahwa aku membenci kemurnian. Itu mitos. Kehidupan itu berantakan, melompat-lompat dan terus mengalir. Secara subjektif, aku tidak akan percaya siapa saja yang mengklaim dirinya murni. Dan, secara objektif, bagaimana mungkin kamu jadi "murni" jika kamu tidak menjalani pelatihan ideologis yang terstruktur dan "kepakaran"-mu tidak diuji melalui debat terbuka? Orang-orang yang mendapuk diri sebagai "pakar" atau "ideolog" ini memutuskan apa itu "murni" lalu membangun organisasi mereka berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai "murni" itu. Banyak yang memutar ulang rumusan lama ideology Kiri—membangkitkan kembali tesis "semi feudal semi kolonial" ala PKI atau materialisme-dialektika-logika ala Tan Malaka.[20] Bersetia dengan semangat purifikasi, mereka tidak berusaha memodernkan teorinya tapi menyajikannya dalam bentuknya yang termurni—apapun artinya itu. Mereka tidak berusaha mendayagunakan teori untuk memahami kompleksitas kapitalisme modern; mereka malah mereduksi kompleksitas ini ke dalam slogan-slogan yang mudah dikunyah.

Namun satu hal menjadi benang merah dari kelompok-kelompok ini: mereka menolak mengakui bahwa pemilu adalah jalan yang absah bagi Gerakan Kiri untuk meraih kekuasaan.

Tendensi yang memilih untuk melakukan kolaborasi kelas terwakili secara paling mencolok oleh PRD. Betapa dunia ini sudah terbalik. Pada pemilu 2009, PRD (di bawah bendera PAPERNAS) mensubordinasi partainya ke dalam Partai Bintang Reformasi (PBR)—yang didirikan oleh pendakwah reaksioner Zainuddin MZ. Dita Sari, ketua umum PRD masa itu, bahkan mendapatkan kursi dalam Dewan Pimpinan Pusat PBR.[21] Tapi ini belum seberapa dibandingkan apa yang datang kemudian:

subordinasi PRD, di bawah kepemimpinan Agus Jabo, ke pelukan GERINDRA untuk pemilu 2014 dan seterusnya. GERINDRA. Prabowo. Kita tahu apa artinya itu. Dan, sebagaimana Dita Sari, Agus Jabo juga mendapat posisi sebagai salah satu ketua GERINDRA.[22]

Jadi, Gerakan Kiri berusaha menjawab kebangkitan Kanan dengan membelah diri menjadi dua arus-utama: puritan dan penggadai iman.

Pernah ada satu harapan akan munculnya satu kontra-tendens yang akan bekerja sebagai kekuatan penyeimbang bagi kedua arus utama ini. Di tahun 2004, faksi-faksi pecahan dari beberapa kelompok arus utama berkumpul di Solo untuk membentuk Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP). PRP diniatkan berfungsi sebagai platform untuk menyatukan berbagai kecenderungan ideologis dan untuk memupuk kepemimpinan politik dari buruh dan tani. Sayangnya, proyek ini sesungguhnya sudah layu sebelum berkembang. PRP tidak sadar bahwa "sebelum kita dapat bersatu, dan agar kita dapat bersatu, kita harus terlebh dahulu menarik garis demarkasi yang teguh dan tegas. ."[23] Tanpa berbekal prinsip ini, PRP langsung compang-camping di tahun pertama pembentukannya. Dari sekitar seratus orang yang menghadiri konferensi pembentukannya, hanya segelintir yang masih tinggal untuk menghadiri Kongres Pertama di tahun 2007. Kebanyakan dari anggota pendiri telah merat, mengejar karir yang lebih menjanjikan sebagai agen bebas atau bergabung dengan partai-partai borjuasi.

PRP sempat bangkit, sejenak. Dengan berfokus pada pengembangan organisasi, di antara kongres pertama dan kedua, PRP berhasil melipatempatkan keanggotaanya jika dibandingkan jumlah kehadiran pada konferensi Solo; PRP berdiri di 15 kota kunci di Jakarta—nyaris tiga kali lipat dari jumlah kota yang mengirim delegasi ke kongres pertama. PRP punya banyak kota yang kepemimpinannya sepenuhnya dipegang buruh. Suasana menuju kongres kedua sungguh menggairahkan.

Tapi PRP gagal belajar dari kesalahannya yang terdahulu. Diam-diam, ada ketakutan besar bahwa jika ada perdebatan besar lagi, organisasi akan kembali pecah berantakan. Kesatuan dipandang sebagai pokok dan perdebatan dianggap mengganggu. Namun, apa daya, peningkatan peran buruh dalam PRP segera memicu perdebatan baru; dan, tentu saja, perdebatan ini adalah tentang peran serikat dalam perjuangan politik. Perdebatan ini berkobar dalam beberapa tingkatan, dari mulai aspek teknis dan organisasional sampai ke ideologis. Satu sisi dalam debat ini berpandangan bahwa peran serikat adalah untuk berjuang bagi hak buruh, sementara perjuangan politik yang lebih besar harus diserahkan pada para revolusioner professional yang dibayar. Sisi yang lain berpendapat bahwa buruh harus menggunakan pengalamannya dalam perjuangan hak buruh untuk mengorganisir dan membantu lingkungan di mana buruh itu tinggal, dalam isu-isu sosial-ekonomi yang lebih luas dari sekedar isu buruh.

Sementara perdebatan tengah berlangsung sengit, kelompok revolusioner professional ini melakukan maneuver untuk menyingkirkan kelompok lawannya dari keanggotaan. Pimpinan Pusat, yang sudah tidak nyaman dengan adanya perdebatan ini dan hanya ingin segera mendapatkan penyelesaian, mengesahkan maneuver ini; dan debatpun diaborsi.

Ini sungguh sebuah keputusan yang salah langkah; karena, dalam bulan-bulan berikutnya, menjadi jelas bahwa posisi para revolusioner professional ini memang ingin menceraikan buruh dari perjuangan politik yang lebih luas. Tidak berapa lama setelah "memenangkan debat", mereka membuat maneuver lain untuk menggerus relasi organik antara PRP dan sayap buruhnya, Kontres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Dan, dalam kongresnya di tahun 2011, KASBI secara resmi memutuskan semua afiliasinya terhadap PRP. Setelah sukses membuat maneuver untuk melumpuhkan PRP, faksi revolusioner professional ini memisahkan diri dari PRP dan mendirikan KPO-PRP. Manuver ini membuat marah faksi loyalis PRP dalam KASBI dan, tidak berapa lama KASBI pun pecah. Para loyalis mendirikan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dan membangun ulang relasi organik mereka dengan PRP. Tapi kerusakan sudah terjadi dan PRP tidak pernah bisa bangkit lagi sesudahnya.

PRP tidak akan pernah dapat menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang menghantui Gerakan Kiri Indonesia secara luas: apakah peran buruh dan tani (serta rakyat pekerja lainnya) dalam Politik Kiri? Apakah peran perdebatan dalam memupuk kedewasaan ideology dan politik Gerakan Kiri? Seperti apa seharusnya hubungan antara organisasi politik dengan serikat? Apa peran pemilu dalam membangun momentum ke arah revolusi? Apa peran Gerakan Kiri untuk menjaga kelangsungan Reformasi, yang telah ia capai dengan tumpahan darah?

Tentu saja PRP boleh lari dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi, selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara tepat, Gerakan Kiri akan terus layu dan lunglai.

Gerakan Kiri Mengabaikan Tugas Demokratiknya

Tidak ada momen yang lebih tepat untuk menunjukkan kerancuan pikir Gerakan Kiri selain dalam Pemilu Presiden 2014. Ada dua kandidat yang bertarung untuk kursi presiden: Jenderal Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Pemilu Presiden ini adalah salah satu tonggak kebangkitan Sayap Kanan. Inilah pertama kalinya Politik Kebencian menjadi dominan dalam wawasan politik nasional. Sekalipun dia adalah seorang Muslim, Jokowi diberitakan sebagai "komunis", "aseng" ataupun "Kristen". Lalu satu kampanye kebencian dilancarkan secara massif terhadap ketiga kategori itu. Ini adalah masa yang sangat menegangkan, di mana kawan secara harafiah berubah menjadi lawan.

Pilihan antar kedua kandidat seharusnya mudah. Yang satu mengusung penguatan terhadap borjuasi nasional; yang lain mengusung kebencian dan sektarianisme. Semua orang yang berpikir waras tidak akan ragu sedetik pun. Namun Gerakan Kiri Indonesia ternyata ragu. Setelah terbiasa mengubur kepala di dalam pasir sekian lama, Gerakan Kiri kembali melakukan kebiasaan buruknya dengan mengabaikan politik elektoral; khususnya karena semua orang yakin, pada awalnya, bahwa Jokowi akan memenangkan pemilu ini dengan mudah.

Namun, seiring dengan semakin mendekatnya Hari Pemilihan, elektabilitas Prabowo meroket; sementara Jokowi perlahan merosot. Dari 58% di bulan Mei 2014, elektabilitas Jokowi turun ke 51% di bulan Juni, sementara Prabowo menapak dari 23% ke 32% di bulan terakhir sebelum Pemilu

Presiden itu—di mana 17% pemilih belum menetapkan pilihan[24]—dan terus bertumbuh. Peluang Prabowo untuk memenangkan pemilu ini menjadi nyata. Kampanye kebencian itu sukses besar.

Gerakan Kiri buru-buru merespon. Di bulan Mei, debat besar pecah di IndoProgress. Gerakan Kiri berupaya keras untuk menemukan basis ideologi agar dapat membendung Prabowo. Sebagian besar Gerakan Kiri mendukung pemikiran bahwa Prabowo adalah seorang fasis.[25] Dan, karena mudharat ini, Gerakan Kiri haruslah mendukung Jokowi—dengan syarat bahwa Jokowi berjanji menghormati HAM selama masa pemerintahannya. Di pihak seberangnya, yang sebagian besar digawangi oleh orang-orang Trotskyis, terdapatlah mereka yang menyangkal bahwa Prabowo adalah fasis; dengan argumen bahwa kondisi yang melahirkan fasisme di Eropa tahun 1930-an tidak ada di Indonesia.[26]

Namun debat ini tidak berumur panjang; ketakutan bahwa Prabowo akan benar-benar memenangkan pemilu akhirnya menggiring Gerakan Kiri untuk berkumpul di balik punggung Jokowi. Bahkan kelompok-kelompok yang dikena dekat dengan Trotskyis juga akhirnya mengalah dan muncul dengan platform "Jangan Pilih Prabowo"—mereka ngotot bahwa "tidak memilih Prabowo" (tanpa harus memilih Jokowi) akan cukup untuk membawa Jokowi pada kursi Presiden.

Jokowi memenangkan pemilu dengan tipis; 53% vs 47% —perbedaannya hanya 8 juta suara, di dalam pemilu dengan *voter turnout* 70%.[27] Debat Besar Gerakan Kiri, pada akhirnya, terbukti terlalu telat dan terlalu tak berguna. Prabowo tetap meraih peningkatan signifikan dalam perolehan suara—di mana sebagian besar dari mereka yang belum menentukan pilihan akhirnya memilih Prabowo, bukannya Jokowi.

Lebih jauh lagi, perdebatan ini akhirnya tetap tidak menyentuh masalah Kiri dan Pemilu. Kedua sisi argument gagal menyorot relasi antara pemilu dan revolusi. Kedua sisi gagal mengemukakan masalah antara partai revolusioner dan partai reformis—baik partai buruh maupun partai borjuis. Pada kenyataannya, mereka lalai mendiskusikan beberapa prinsip pokok menyangkut pemilu itu sendiri. Mereka lupa bertanya apakah sebuah partai revolusioner harusnya "berpartisipasi dalam parlemen yang paling kontra-revolusioner sekalipun, dan… bahwa partisipasi ini bukan hanya berguna namun tidak dapat diabaikan oleh partai proletariat revolusioner" ?[28] Benarkah bahwa "kaum Sosial-Demokrasi mendukung kelas-kelas social progresif untuk melawan kelas-kelas reaksioner, mendukung borjuasi melawan kelas tuan tanah dan birokrasi, mendukung borjuasi besar melawan borjuasi kecil reaksioner" "?[29]

Tapi, yang terlebih penting, kedua sisi argument lupa—atau abai—terhadap prinsip dasar pembangunan aliansi, khususnya menyangkut perjuangan demokratik: "kaum Sosial Demokrat memberikan dukungannya demi mempercepat runtuhnya musuh bersama, namun tidak mengharapkan apa-apa *bagi diri mereka sendiri* dari aliansi sementara ini, dan tidak memberi konsesi apapun pada aliansi itu."[30] (Cetak miring dari penulis aslinya.) Mereka yang mendukung Jokowi melakukannya dengan ilusi bahwa Jokowi akan menjadi kapitalis yang menghormati HAM. Mungkin secara pribadi dia bisa begitu, tapi dia hanyalah satu sekrup di dalam sistem gerigi yang dipenuhi birokrat dan jenderal reaksioner. Betapapun dia ingin menghormati HAM, dia akan bekerja di bawah tekanan sebuah system yang bahkan tidak menghormati hak hidup manusia—jangankan

lagi hanya HAM. Banyak dari para pendukung Jokowi ini kini mengalami kekecewaan mendalam karena rekor HAM Jokowi, sekalipun tidak seburuk pendahulunya, tetap saja buruk. Memalukan sebenarnya, karena Gerakan Kiri seharusnya tidak melancarkan perjuangan demokratik dengan cara transaksional atawa tawar-menawar. Sebagai satu-satunya bagian masyarakat yang punya kesempatan menjadi pelopor sejati demokrasi, kita seharusnya paham bahwa kita tidak mengharap apapun dari kawan-kawan aliansi kita—kita sudah tahu mereka itu pembimbang dan inkonsisten. Gerakan Kirilah satu-satunya harapan masyarakat untuk adanya Pembela Demokrasi Sejati. Mereka yang memilih platform "anti-Prabowo" lebih buruk lagi karena mereka terbukti setengah hati membela demokrasi yang terancam oleh kaum reaksioner.

Dan, jika Gerakan Kiri tidak dapat menentukan sikap dengan cepat di tengah dua pilihan yang sebegitu gambling, kita tidak akan heran bahwa pembelahan di kalangan Kiri dalam Pilkada Gubernur Jakarta 2017 yang baru lewat sungguh melumpuhkan Gerakan Kiri.

Mari kita tinjau sedikit kerangka sejarahnya. Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi adalah Gubernur Jakarta. Begitu dia disumpah sebagai Presiden RI, Wakil Gubernur-nya BTP alias Ahok berkesempatan menjadi Gubernur pertama dari etnis Tionghoa dalam sejarah Indonesia sejak proklamasi 1945. Sebagai pasangan, Jokowi dan Ahok saling melengkapi. Jokowi bersikap halus dan bermulut manis; yang kekuatan persuasinya dapat membuat keputusan politik yang tersulit sekalipun berlangsung mulus. Ahok, di pihak lain, adalah pribadi yang sradak-sruduk; yang taktik garis-kerasnya manjur menangani para pialang politik dan birokrat korup. Keduanya berkomitmen mewujudkan kapitalisme modern di Jakarta dan, sebagai pasangan, merupakan pengejawantahan dari slogan ternama Teddy Roosevelt: "bicaralah dengan lembut, tapi bawalah penggada besar."

Kehilangan pasangannya, Ahok guncang. Pendekatannya yang dipenuhi dobrakan tanpa kompromi masih tetap jalan sampai taraf tertentu, namun kekurangannya segera terlihat. Jika ditinjau ulang, kita tidak akan terlalu terkejut bahwa dia menjalankan kebijakannya tanpa belas kasihan. Kesalahan terbesarnya adalah ketika dia bersikeras menjalankan rencananya untuk membersihkan jalur air Jakarta; dan, dengan itu, dia berbenturan dengan salah satu komunitas miskin kota yang paling terorganisir di Jakarta—di Kampung Pulo. Kampung miskin kota kecil ini telah diorganisir oleh beberapa nama terbesar dalam aktivisme miskin kota, yang memiliki jejaring aktivis tangguh di belakang mereka, sejak awa 1990-an. Dengan membentur komunitas ini, Ahok mengusik sarang besar tawon tabuhan.

Apa yang dilakukan Ahok adalah sejalan dengan arah umum yang diambil kelas kapitalis Indonesia: infrastruktur. Agar dapat merayap keluar dari krisis, Indonesia harus membangun infrastruktur; mengejar visi kapitalisme modern. Namun pendekatan Ahok terhadap infrastruktur menghasilkan dua masalah besar: *pertama*, ia didasarkan pada visi modernism yang ditayangkan oleh negeri kapitalis maju; dan *kedua*, ia digarap dengan menggunakan Negara sebagai pemain utama. Modernisme yang tumbuh di negeri kapitalis maju berkembang secara organik lewat sejarah pertarungan kelasnya. Ini bukan satu hal yang dapat dibangun dalam semalam, kecuali dengan menumpahkan darah warga miskin. Dan, dengan menempatkan Negara sebagai pemain utama dalam soal infrastruktur ini, Ahok menyingkirkan para pialang politik dan pemodal besar yang

terbiasa melintah pada proyek-proyek semacam ini. Dengan taktiknya yang sradak-sruduk, Ahok pun segera terkepung dari dua sisi—baik warga miskin maupun kapitalis-birokrat memusuhinya.

Gerakan Kiri dengan tepat mengobarkan perlawanan terhadap pengusiran paksa yang dilakukan Ahok. Tidak dapat dipertanyakan lagi bahwa Ahok haruslah dituntut pertanggungjawabannya atas pelanggaran HAM ini. Namun, karena Gerakan Kiri goyah dalam hal mempertahankan demokrasi, dan karena Kiri telah menyingkirkan dialektika dari kerja-kerja hariannya, mereka membiarkan diri dipeluk mesra oleh Sayap Kanan dalam perjuangan menentang Ahok.

Tiada bedanya dengan masa pencalonan Jokowi sebagai presiden, pada awalnya kelihatan tidak mungkin mendongkel Ahok dari kursi jabatannya. Tidak seorang pun dapat bersaing dengan popularitas Ahok; dan bahwa 70% warga Jakarta puas dengan kinerjanya.[31] Kombinasi dari keputusasaan, dalam pertarungan mereka melawan apa yang nampaknya tak terlawan, dan kurang teguhnya Gerakan Kiri dalam memegang prinsip-prinsip perlawanan terhadap kapitalisme membuat Kiri goyah ketika Sayap Kanan menemukan figur yang sanggup bersaing dengan Ahok—dalam diri Anies Baswedan—dan isu kunci untuk menggerogoti popularitas dan elektabilitas Ahok.

Suasananya seperti kembali pada Pemilu Presiden. Aliansi antara para jenderal reaksioner dalam GERINDRA dan politisi Islamis reaksioner dalam PKS dengan cepat menerapkan kembali taktik yang mereka pakai dalam pemilu presiden; demi memenangkan Anies. Saat ini, mereka punya amunisi lebih: jika Jokowi saja, yang Muslim, bisa dikafirkan; Ahok yang Kristen dan keturunan Tionghoa adalah sasaran empuk.

Hanya dibutuhkan satu selip lidah: Ahok mengkritisi penggunaan ayat Quran dalam kampanye Pilkada. Sayap Kanan sigap membangun satu propaganda bahwa Ahok menghina Quran, dan menggenjot model kampanye yang justru dikritisi Ahok. Tabligh Akbar diorganisir di mana-mana, secara berterang menyeru agar orang tidak memilih pemimpin non-Muslim dan untuk melancarkan pengasingan social terhadap semua Muslim yang mendukung Ahok. Demonstrasi besar-besaran dipimpin oleh FPI menyerukan pemenjaraan Ahok, diadakan dalam skala nasional, di mana pidato kebencian bertebaran menyesakkan udara.

Dan Gerakan Kiri terbelah dalam menghadapinya. Belahan pertama, yang menyebut diri mereka anti-Ahok dan anti-penggusuran, dengan cepat melemparkan diri mereka ke dalam haribaan Sayap Kanan. Banyak di antara para aktivis ini bahkan bergabung dengan tim pemenangan pemilu Anies dan, pastinya, terlibat dalam Banyak di antara para aktivis ini bahkan bergabung dengan tim pemenangan pemilu Anies dan, pastinya, terlibat dalam perancangan strategi penggunaan kampanye kebencian untuk menyingkirkan Ahok.[32] Seberapa dalam keterlibatan para aktivis ini untuk menggalang kampanye kebencian, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Satu-satunya hal yang terang adalah bahwa mereka secara praktis telah menjadi apologis untuk Anies di kalangan Kiri, membalas semua kritik tentang penggunaan pidato kebencian sebagai strategi elektoral dengan artikel-artikel pedas level 10 melawan Ahok dan para pendukungnya.

Belahan kedua, yang melihat bahaya pidato-pidato kebencian ini ragu untuk menyalakan api untuk menyemangati argument mereka. Sebagian karena mereka sendiri sebenarnya anti-Ahok, dan ingin

melihat Ahok tersingkir—hanya saja bukan oleh Anies dan para pendukungnya dari Sayap Kanan fundamentalis; dan sebagian lagi karena mereka tidak ingin berbenturan dengan sesama aktivis yang memperjuangkan anti-penggusuran. Lebih jauh lagi, tiap upaya untuk menentang kampanye kebencian yang dilancarkan Anies—bahkan penentangan yang malu-malu—akan segera disikat dengan tuduhan bahwa sang pengritik adalah pengkhianat warga miskin, diserang habis-habisan oleh para aktivis pro-Anies.

Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana penceraian isu social dari isu demokratik dapat menggiring aktivis social ke dalam ciuman beracun Sayap Kanan.

Akan selalu ada ketegangan antara isu-isu sosial-ekonomi yang mendesak dengan isu demokratik yang lebih luas. Pada isu-isu sosial-ekonomi, perjuangan kita nampaknya lurus-lurus saja; penindasmu adalah musuhmu—tamat, titik. Namun, penampilan bisa menipu. Perjuangan untuk upah layak, misalnya, nampak seperti satu cara yang tepat untuk melancarkan perjuangan kelas dan membangun kesadaran kelas. Keliru. Upah layak hanyalah target antara. Kita berjuang untuk upah layak agar beban hidup buruh menjadi lebih ringan; diharapkan, dengan demikian, mereka jadi punya lebih banyak waktu dan sumber daya untuk belajar dan melatih diri sampai trampil memperjuangkan tujuan yang sejati: penghapusan upah dan sistem kerja-upahan. Juga pas rasanya jika kita berjuang untuk hak rakyat mendapat tempat tinggal di dalam kota. Walau demikian, ini hanyalah langkah antara untuk membeli waktu sementara kita berjuang untuk tujuan sebenarnya: penghapusan urbanisasi melalui pemangkasan jurang antara desa dan kota. Baik penghapusan kerja upahan maupun pemangkasan jarak desa-kota tidak akan dapat dicapai di bawah sebuah pemerintahan yang tidak demokratis. Rakyat pekerja harus tumbuh melampaui kesengsaraan pribadinya, mengembangkan kapasitas untuk memimpin perubahan sosial yang diperlukan untuk menggulingkan tatanan yang sekarang bercokol. Sistem pendidikan yang akan membina pemimpin-pemimpin ini *tidak akan dapat* berkembang di luar sistem politik yang demokratis.

Dengan membuat apa yang seharusnya menjadi tujuan antara menjadi tujuan akhir yang tak dapat ditawar, Gerakan Kiri tersesat jauh dari kewajibannya untuk menjadi garda depan *sosialis* sekaligus *demokrasi*.

Demikianlah, Ahok terpukul kalah secara telak. Kampanye kebencian kini benar-benar dituai tuntas; kita tahu bahwa 33% dari mereka yang memilih Anies dengan bangga menyatakan bahwa mereka memilih berdasarkan agama.[33] Dan kali ini Gerakan Kiri adalah pihak yang paling bersalah dalam kemenangan Sayap Kanan ini; baik dengan berpartisipasi dalam kampanye kebencian, dengan menjadi apologis bagi mereka yang melancarkan kampanye kebencian, atau dengan gagal mengobarkan kritik tanpa ampun terhadap kedua praktek tersebut.

Terlecut oleh kemenangan itu, aliansi reaksioner antara para jenderal dan pemimpin kekerasan agama kini memasang target baru: kursi presiden. Sayap Kanan telah menemukan resep bagi kemenangannya: cari pribadi yang berwajah manis untuk dipasang sebagai tokoh, lancarkan kampanye kebencian secara massif, dan dorong Gerakan Kiri untuk terus menceraikan isu sosial dan

isu demokratik.

Update Pasca Pengesahan PERPPU Ormas

Aku tidak akan mengulas banyak soal ini. Hanya ini: kritik dan penolakan Gerakan Kiri terhadap PERPPU Ormas sesungguhnya bisa dibenarkan apabila, pada saat bersamaan mengakui bahwa 1) sebuah pemerintahan kapitalis tidak akan dapat diharapkan bertindak tegas terhadap ormas Kanan (termasuk HTI)—biar bagaimana pun, musuh bebuyutan rejim kapitalis adalah Kiri; 2) mengakui bahwa cengkeraman Kanan terhadap hati dan pikiran bangsa Indonesia telah mencapai tahap hegemonik, dan merupakan kondisi yang darurat bagi gerakan Kiri; 3) mengakui bahwa tugas Gerakan Kiri lah untuk menghadang Kanan, terlebih yang reaksioner, dan menyatakan mengambil alih tugas itu dari Negara Kapitalis.
Ketika Gerakan Kiri hanya menuntut pencabutan PERPPU Ormas tapi bersikeras cuci tangan terhadap kebangkitan kanan ini, bahkan juga bersikap permisif terhadap mereka yang mengaku Kiri tapi bersekutu dengan Kanan Reksioner, Gerakan Kiri telah menyerahkan kepalanya untuk dipenggal di kemudian hari.

Apakah Masih Ada Harapan bagi Gerakan Kiri Indonesia?

Jujur kacang ijo, jawabanku adalah, “Aku tidak tahu.” Selama lebih dari dua dasawarsa, Gerakan Kiri telah bersikeras menolak mengubah kebiasaan-kebiasaannya. Gerakan Kiri menolak dialektika dan merengkuh politik transaksional. Sekalipun tidak punya secuilpun kaitan pada masa lalu, pada warisan ideology Perang Dingin, Gerakan Kiri telah memilih untuk memperlakukan teks klasik sebagai Kitab Suci dan mengusung dogmatisme. Lebih buruk lagi, pensakralan ini dilakukan dengan mengandal teks-teks yang dipotong keluar dari konteks sejarahnya; tanpa upaya serius untuk mempelajari latar belakang sejarah yang melahirkan teks-teks tersebut.

Gerakan Kiri Indonesia butuh berubah, dan perubahan itu harus datang sekarang. Ia harus mulai melatih rakyat pekerja untuk melancarkan perjuangan demokratik. Buruh harus mulai berjuang untuk air bersih, lingkungan yang bebas dari polusi, transportasi publik yang lebih baik dan lebih murah, emansipasi perempuan. Tan harus mulai berjuang untuk pendidikan yang ilmiah dan demokratik dan tancap gas dalam upaya pemberantasan korupsi. Miskin Kota harus mulai berjuang untuk industrialisasi pedesaan lewat cara-cara yang emansipatoris. Dan lain-lain, dan seterusnya. Gerakan Kiri perlu keluar dari perjuangan sosial-ekonomi yang sempit dan mulai membangun visi mengenai masyarakat sosialis yang hendak dibangun.

Sayap Kanan telah menemukan momentumnya—tanpa perlawanan berarti dari Gerakan Kiri, Indonesia akan segera dikuasai oleh aliansi reaksioner dari para Jenderal dan Pemimpin Agama penganut Teologi Kekerasan.

Jakarta, 27 April 2017

[1] Mega-Bintang-Rakyat (MBR) adalah satu koalisi dari kelompok-kelompok radikal dalam PDI-Perjuangan, PPP dan mahasiswa di bawah bendera tuntutan “pemilu jurdil”—yang diarahkan melawan GOLKAR dan, dengan demikian, melawan Suharto. Hanya ada tiga partai politik yang diijinkan beroperasi selama Orde Baru; dan GOLKAR senantiasa memastikan bahwa Pemilu selalu akan memenangkan mereka—menjamin keberlangsungan kekuasaan Suharto yang “demokratik”.

[2] Arifin, Wein. Voter Turnout dan Demokratisasi. https://weinarifin.wordpress.com/2015/01/19/voter-turnout-dan-demokratisasi/. Accessed 28 February 2017.

[3] “Ada Perda Perempuan Dilarang Keluar Malam, Ahok: Kebablasan”. Liputan 6. 6 December 2013. http://news.liputan6.com/read/767166/ada-perda-perempuan-dilarang-keluar-malam-ahok-kebablasan. Accessed 28 February 2017.

[4] “Naik motor, perempuan Aceh dilarang ngangkang”. SindoNews. 2 January 2013. https://daerah.sindonews.com/read/702905/24/naik-motor-perempuan-aceh-dilarang-ngangkang-1357116343. Accessed 28 February 2017.

[5] “Kemendagri: Perda ‘Diskriminatif’ Justru Lindungi Perempuan”. BeritaSatu. 23 November 2012. http://www.beritasatu.com/berita-utama/84618-kemendagri-perda-diskriminatif-justru-lindungi-perempuan.html. Accessed 28 February 2017.

[6] Schulze, Kirsten E. “Laskar Jihad and the Conflict in Ambon”. *The Brown Journal of World Affairs*. Spring 2002 –Volume IX, Issue 1. https://www.brown.edu/initiatives/journal-world-affairs/sites/brown.edu.initiatives.journal-world-affairs/files/private/articles/9.1_Schulze.pdf. Accessed 28 February 2017.

[7] Yang aku rujuk adalah konsep dasar “emansipasi” yang dikerangkakan oleh Karl Marx dalam *The Jewish Question*; dan dapat dirangkum secara agak terburu-buru sebagai “status setara antar individu warga dalam relasinya terhadap Negara, kesetaraan di depan hukum tanpa memandang agama, kekayaan atau ciri ‘privat’ lain dari masing-masing individu.”

[8] “Lima Seruan Buruh dalam Mogok Nasional”. Tribun News, 31 October 2013. http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/31/lima-seruan-buruh-dalam-mogok-nasional (retrieved 2 March 2017).

[9] “Obon Tabroni—from poor worker to independent regent candidate”. Jakarta Post, 2 November 2016. http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/02/obon-tabroni-from-poor-worker-to-independent-regent-candidate.html (retrieved 2 March 2017).

[10] Fasilitas kesehatan, pendidikan budaya-agama, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, bisnis kecil, infrastruktur, konservasi lingkungan, *open data government*, partisipasi public dalam proses pengambilan keputusan. Untuk daftar lengkapnya, lihat “Obon Bambang Luncurkan 9 Program Prioritas Untuk Pembangunan Kabupaten Bekasi”. KSPI, 1 February 2017. http://www.kspi.or.id/9-program-prioritas-obon-bambang-untuk-pembangunan-kabupaten-bekasi.html (retrieved 2 March 2017).

[11] Hall, Peter A. and David Soskice. “An Introduction to Varieties of Capitalism” in *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. (Hall and Soskice, ed.). Oxford University Press. Oxford, 2001.

[12] “Hitungan Sementara KPUD Bekasi, Dhani Tumbang dengan Selisih 20%”. Merdeka, 16 February 2017. https://www.merdeka.com/peristiwa/hitungan-sementara-kpud-bekasi-dhani-tumbang-dengan-selisih-20-.html (retrieved 2 March 2017).

[13] Juga ada partai-partai yang telah punah seperti Papernas, PPR, yang berusaha dan gagal mendapat verifikasi sebagai peserta pemilu. Ada pula kelompok-kelompok yang telah menyatakan niatnya untuk mendirikan partai politik seperti KPRI.

[14] Putu Agung Nara Indra. “FPI dalam Lintasan Sejarah.” TirtoID. 4 November 2016. https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT Accessed 2 March 2017.

[15] “Bocoran Wikileaks: Mendanai FPI adalah Tradisi Polri dan BIN”. TribunNews. 3 September 2011. http://www.tribunnews.com/nasional/2011/09/03/bocoran-wikileaks-mendanai-fpi-adalah-tradisi-polri-dan-bin Accessed 2 March 2017.

[16] Daud, Afrianto. “Mencermati ‘Tarian Politik’ PKS”. Dakwatuna. 14 March 2014. http://www.dakwatuna.com/2014/03/14/47767/mencermati-tarian-politik-pks/ Accessed 2 March 2017.

Untuk diskusi yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam Politik menggunakan lembaga amal sebagai alat ideologis mereka, lihat Hadiz, Vedi. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press. 2016.

[17] Aku merujuk pada konsep praksis yang dikerangkakan oleh Paulo Freide dalam *Pedagogy of the Oppressed*, yang melibatkan aksi sekaligus refleksi, pembelajaran sekaligus perombakan wawasan.

[18] Nugroho, Ragil. "PKS dan Lenin". Indoprogress. 13 May 2012. https://indoprogress.com/2012/05/pks-dan-lenin/ Accessed 1 April 2017.

[19] Bukan hanya partai Islam tapi juga partai Kristen. PKB yang dipimpin Gus Dur bahkan berhasil meraih posisi nomor 3 dalam pemilu ini.

[20] Untuk mencicip rasa SFSK, lihat Akang Muhib, "Benarkah Indonesia Masih Semi-Koloni dan Semi-Feodal?". Kawan Desa. 26 February 2013. https://kawandesa.wordpress.com/2013/02/26/benarkah-indonesia-masih-semi-koloni-dan-semi-feodal/ (Accessed 1 April 2017). Untuk mencicip rasa Tan Malaka, lihat Malaka, Tan. *Aksi Massa*. Teplok Press. 2000. https://www.marxists.org/indonesia/archive/malaka/AksiMassa/index.htm (Accessed 1 April 2017).

[21] Dewi Savitri. "Matinya politik kiri Indonesia". BBC-Indonesia. 1 Oktober 2010. http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101001_kiri5.shtml (Accessed 17 April 2017).

[22] "Pengurus Baru Gerindra: 314 Pengurus, Puluhan Jenderal dan Aktivis". BeritaSatu. 12 July 2012. http://www.beritasatu.com/nasional/59534-pengurus-baru-gerindra-314-pengurus-puluhan-jenderal-dan-aktivis.html (Accessed 17 April 2017).

[23] Lenin. "Declaration of the Editorial Board of Iskra". Lenin Collected Works, Progress Publishers, 1964, Moscow, Volume 4, pages 351-356. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1900/sep/iskra.htm (Accessed 17 April 2017).

[24]"Laporan Rilis Survei 13 Mei 2014 'Split-ticket Voting, Karakteristik Personal, dan Elektabilitas Capres'". Indikator Politik Indonesia. http://www.indikator.co.id/news/details/2/49/Laporan-Rilis-Survei-13-Mei-2014-Split-ticket-Voting-Karakteristik-Personal-dan-Elektabilitas-Capres- (accessed 17 April 2017).

[25] For example, see Pontoh, Coen Hussain. "50 Hari Menuju Pilpres: Demokrasi vs Fasisme-Religius". IndoProgress. 22 May 2014. https://indoprogress.com/2014/05/50-hari-menuju-pilpres-demokrasi-vs-fasisme-religius/ or Anugrah, Iqra. "Demokrasi atau Barbarisme". IndoProgress. https://indoprogress.com/2014/05/demokrasi-atau-barbarisme/ (accessed 17 April 2017). Keduanya adalah pecontoh kecil dari banyak artikel sewarna.

[26] See Sprague, Ted. "Apa ada Bahaya Fasisme di Indonesia?". IndoProgress. 13 June 2014. https://indoprogress.com/2014/06/apa-ada-bahaya-fasisme-di-indonesia/ (accessed 17 April 2017).

[27] Wikipedia. "Indonesian presidential election, 2014" https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_presidential_election,_2014 (accessed 17 April 2017).

[28] Lenin. *"Left-Wing" Communism: an Infantile Disorder*. Chapter VIII. "Should We Participate in Bourgeois Parliaments?" https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/lwc/ch07.htm

[29] Lenin. *The Tasks of the Russian Social-Democrats*. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1897/dec/31b.htm

[30] Ibid.

[31] "Survei SMRC: 75% Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Ahok, Kecuali Soal Macet". DetikNews. 20 October 2016. https://news.detik.com/berita/d-3325425/survei-smrc-75-warga-jakarta-puas-dengan-kinerja-ahok-kecuali-soal-macet (Accessed 17 April 2017).

[32] Beberapa dari aktivis yang melemparkan diri ke dalam pelukan Anies didaftarkan di sini https://www.quora.com/Who-were-the-key-people-behind-Anies-Baswedans-2017-Jakarta-gubernatorial-campaign?share=1

[33] "Tingkat Kepuasan Warga Jakarta Lebih Dari 70% Terhadap Ahok Tapi Pilih Anies Karena Sama Agama". Idpelago. http://www.idpelago.com/tingkat-kepuasan-warga-jakarta-lebih-dari-70-terhadap-ahok-tapi-memilih-anies-karena-sama-agamanya/ (Accessed 17 April 2017).